

**HUBUNGAN TINGKAT PEMAHAMAN TENTANG GENDER  
DENGAN TINGKAT PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN  
KECAMATAN TEMBILAHAN DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
PERIODE 2008-2013**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program  
Studi Ilmu Administrasi Negara**



**Oleh:**

**NILA SUDARMA DEWI**

**05 193 036**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**



No. Alumni Universitas	<b>NILA SUDARMA DEWI</b>	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/ Tanggal Lahir: Tembilahan/11/05/87 b). Nama Orang Tua: H. R. Darwis S.Sos dan Hazmawati c). Fakultas: ISIP d). Program Studi: Ilmu Administrasi Negara e). BP : 0193 036 f). Tgl Lulus : g). Prediket Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3,28 i). Lama Studi: 11 Tahun 11 Bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. Trimas No. 56 Tembilahan		


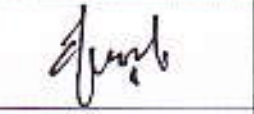
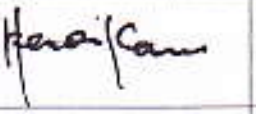
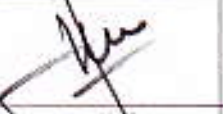

**Hubungan Tingkat Pemahaman Tentang Gender Dengan Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Kecamatan Tembilahan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2008-2013.**


Skripsi S1 Oleh Nila Sudarma Dewi. Pembimbing: 1. Drs. Wahyu Pramono M.Si 2. Roza Liesmana S.IP M.Si

**ABSTRAK**

Berbagai proses demokratisasi terjadi sebagai konsekuensi dari diterapkannya otonomi daerah masuk juga di Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satunya adalah dalam proses pemilihan kepala daerah di mana kepala daerah yang selama ini ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat maka sejak dilegalkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah dengan memilih langsung kepala daerah. Penelitian ini mengkaji mengenai hubungan tingkat pemahaman tentang gender dengan tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2008-2013. Kabupaten Indragiri Hilir Terdiri dari 20 kecamatan, dengan teknik *purposive sampling* diambil Kecamatan Tembilahan sebagai daerah yang merupakan Ibu Kota dan Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi dan teori gender. Partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat terhadap pengimplementasian suatu kebijakan. Sedangkan gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan dikonstruksikan secara sosial maupun kultural artinya semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan sifat laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lain. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe eksplanatori. Data dikumpulkan menggunakan kuisioner. Unit analisis data adalah individu dengan tingkat analisis mikro untuk analisa data menggunakan program computer SPSS 12.0 dan uji hipotesisnya menggunakan teknik Kendall Tau yang disajikan dengan data numeric yaitu tabel frekuensi dan tabulasi silang supaya dapat pertanggungjawabkan keilmiahannya. Dari penelitian ini diketahui bahwa tidak ada hubungan antara variabel tingkat pemahaman tentang gender dengan tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Indragiri Hilir Periode 2008-2013 dengan korelasi sebesar 0,01 .

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Juli 2009. Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Tanda Tangan					
Nama Penguji	Dr. Asmawi MS	Desna Aromatica, S.AP, M.AP	Hendri Koeswara, S.IP, M.Soc.Sc	Drs. Wahyu Pramono, M.Si	Roza Liesmana S.IP, M.Si

Diketahui:  
Dekan Prodi: Nama : Prof. Dr. Damsar, MA Tanda Tangan 

Penulis telah mendaftarkan ke Fakultas/ Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
Alumni Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
Alumni Universitas:	Nama	Tanda Tangan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara merupakan suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.<sup>1</sup> Negara terdiri dari beberapa unsur yaitu, wilayah, penduduk, pemerintah, kedaulatan.<sup>2</sup> Lembaga yang mengatur jalannya fungsi sebuah negara adalah pemerintah. Pemerintah berjalan berdasarkan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan negara.

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di wilayahnya.<sup>3</sup> Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan desentralisasi, oleh karena itu terjadi pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan.

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 40.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 41-44

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 44

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara merupakan suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.<sup>1</sup> Negara terdiri dari beberapa unsur yaitu, wilayah, penduduk, pemerintah, kedaulatan.<sup>2</sup> Lembaga yang mengatur jalannya fungsi sebuah negara adalah pemerintah. Pemerintah berjalan berdasarkan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan negara.

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di wilayahnya.<sup>3</sup> Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan desentralisasi, oleh karena itu terjadi pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan.

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm 40.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 41-44

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 44

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang isinya diadopsi langsung berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah diberi wewenang seluas- luasnya untuk mengoptimalkan potensi dari masing-masing daerah tanpa adanya pengaruh dari pemerintah pusat. Pemerintahan dengan sistem seperti ini sering disebut dengan istilah otonomi daerah. Dalam mewujudkan otonomi daerah didukung oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Manusia pelaksananya harus baik;
2. Keuangan harus cukup dan baik;
3. Peralatan harus cukup dan baik;
4. Organisasi dan manajemennya harus baik.

Pada faktor yang tertera di atas, faktor manusia pelaksana merupakan faktor utama untuk menjalankan suatu pemerintahan. Baik disini adalah mentalitasnya atau moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, dapat bersikap sebagai abdi masyarakat atau *public servant*, dan sebagainya, memiliki kecakapan atau kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>5</sup> Untuk melaksanakan pemerintahan suatu daerah dibutuhkan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bertugas sebagai koordinator dari manusia pelaksana pemerintahan daerah tersebut.

Peranan kepala daerah sangat mendasar dalam pelaksanaan tugas-tugas daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Seorang kepala daerah merupakan

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 66

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm 67

patokan dari pelaksana lain untuk meningkatkan fungsi-fungsi daerah. Seorang kepala daerah merupakan penggerak yang menggerak sistem pemerintahan daerah. Jalannya pemerintahan daerah ditentukan oleh kebijakannya seorang kepala daerah dalam memerintah daerah tersebut. Keberhasilan suatu daerah tergantung kepada kualitas kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala daerah. Dalam Negara Kesatuan republik Indonesia, kepala daerah di samping merupakan alat daerah adalah juga alat pemerintah pusat. Sebagai alat daerah, tugasnya adalah:<sup>6</sup>

1. Menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintah Daerah;
2. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Bersama-sama dengan DPRD membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah.

Sebagai alat Pemerintah Pusat, tugasnya adalah:<sup>7</sup>

1. Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya;
4. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 71

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 72

## BAB VII

### PENUTUP

Berdasarkan penjelasan bab terdahulu, baik dalam kerangka teoritis, pendeskripsian, uji korelasi Kendall Tau maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab terdahulu dapat kita ketahui tidak ada hubungan antara tingkat pemahaman tentang gender dengan tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2008-2013. Namun terdapat faktor-faktor lain yang merupakan bagian dari teori gender yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2008-2013.

Dalam penelitian ini, secara umum tingkat pemahaman perempuan tentang gender dapat dikatakan tinggi. Hal ini dibuktikan dari perhitungan statistik yang telah peneliti lakukan. Perempuan dianggap paham dengan gender namun tidak mampu membedakan tentang fungsi kultural maupun struktural. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya peran perempuan dalam dunia publik. Perempuan menganggap bahwa wilayah publik merupakan wilayah bagi laki-laki sedangkan perempuan hanya berhak pada wilayah privat saja. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan tersebut menyebabkan keinginan perempuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau terjun langsung dalam pemerintahan dianggap kurang, karena pemerintahan dianggap sebagai wilayah publik. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang dihitung secara statistik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah Sawarni. *Pengembangan Swadaya Nasional*. Jakarta: LP3ES, 1993
- Bappeda Kab Inhil, *Indragiri Hilir Dalam Angka*. Tembilahan: Bappeda: 2007
- Dannielle Crittenden, *Wanita Salah Langkah*. Bandung: Qasnita. 2002
- Faisal H. Basri, *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*. Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa. Jakarta: 2003
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005
- Julia Celves Mosse, *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 1993
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia , 1981
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta LP3ES, 1989
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2004
- Muhadjir M. Darwin, *Negara dan Perempuan*. Grha Guru: Yogyakarta. 2005
- Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, 1992
- Riant Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus-Utamaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008